

Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pembangunan Hutan Desa

Sudrajat Martadinata

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: sudrajat_martadinata@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi peran hutan desa dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan penelitian ini untuk memahami efisiensinya pengelolaan anggaran dalam membangun hutan desa. Hutan desa, yang dikelola oleh komunitas setempat, memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan layanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode penelitian meliputi observasi lapangan, dan analisis kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dan praktik tradisional yang diterapkan dalam pengelolaan hutan desa berkontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan dan pengurangan deforestasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang berujung pada keberlanjutan jangka panjang. Studi ini menyimpulkan bahwa model pengelolaan hutan berbasis komunitas, yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kebijakan nasional, dapat menjadi strategi efektif dalam mencapai tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan bahwa sinergi, efisiensi, dan konservasi menjadi kunci pengelolaan anggaran pembangunan hutan desa.

Katakunci: sinergi, efisiensi, konservasi, anggaran, pembangunan hutan desa.

PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengajak kita semua memikirkan bentuk kontribusi yang paling nyata bagi upaya menjaga kelangsungan ekosistem. Tidak perlu memperhitungkan berapa banyak dan berapa intensitasnya. Berkhidmat pada konsistensi akan jauh lebih baik. Dua dasawarsa terakhir telah kita lewati. Perubahan iklim terjadi dengan sangat cepat dari tahun ke tahun. Indikator utama perubahan iklim terdiri dari perubahan pola dan intensitas berbagai parameter iklim yaitu suhu, curah hujan, angin, kelembaban, tutupan awan, dan penguapan (Elvin Adrian, Mimin Karmini, 2009).

Untuk mengetahui adanya perubahan iklim di sekitar kita, dapat dilihat dari fakta-fakta yang telah dan sedang terjadi. Ternyata sejak industrialisasi yang dimulai pada tahun 1780, suhu permukaan bumi sudah mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada rentang tahun 1970-2000 bahwa di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan curah hujan secara ekstrem dibandingkan dengan waktu pada masa 100 tahun silam.

Untuk wilayah Nusa Tenggara khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB). (Suriadi, 2020) menyebutkan bahwa terjadinya perubahan iklim di wilayah NTB dapat dilihat dari adanya kecenderungan volume air sumur yang mengalami penurunan setiap bulannya. Penurunan ini terjadi karena mata airnya berasal dari permukaan. Sehingga kondisi mata air ditentukan oleh curah hujan di lokasi tersebut. Salah satu hambatan dalam mencapai kedaulatan pangan di Indonesia adalah perubahan iklim antara lain cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serangan hama/penyakit dengan konsekuensi serius pada penurunan produksi pertanian khususnya tanaman pangan (Asnawi, 2015). Di dalam tulisan lain (Suriadi, 2020) menjelaskan bahwa perubahan iklim memberikan dampak bagi pertanian di NTB. Sebaliknya sektor pertanian ikut menyumbang atas terjadinya perubahan iklim melalui Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan budi daya tanaman, pestisida, pupuk kimia, kendaraan motor pengolah tanah pertanian. Menjadi pemicu terjadinya GRK di bidang pertanian. Sebagaimana dijelaskan oleh Maria Theresia Sri Budiastuti, (2020) bahwa perubahan iklim menyebabkan fluktuasi tinggi antara intensitas hujan dan kekeringan sehingga



menimbulkan fenomena La-nina dan El-nino. Krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia (Fauzia, 2016).

Kondisi ini merupakan ancaman bagi keamanan pangan dan dengan demikian para pemangku kepentingan wajib mengupayakan tindakan nyata berupa mitigasi dampak perubahan iklim. Agroforestri menjadi pilihan pertama teknologi budidaya pertanian dengan mengedepankan pohon sebagai penyedia layanan ekosistem berupa iklim mikro dan tanah (nutrisi dan air) yang bermanfaat bagi tanaman budidaya (semusim). Teknologi budidaya ini sekaligus meningkatkan potensi lahan suboptimal di Indonesia yang tersedia cukup luas.

Masyarakat NTB khususnya di wilayah pedesaan masih menggantungkan hidupnya dengan bertani. Seperti buah simalakama posisi para petani dalam isu perubahan iklim ini. Di satu sisi menerima akibat dari perubahan iklim. Di sisi lain ikut serta menjadi penyumbang atas terjadinya perubahan iklim. Sebagai masyarakat akademik, kami merasa terpanggil untuk terlibat melalui sebuah karya nyata pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Dusun Sameri Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Desa Poto telah dikenal oleh masyarakat Sumbawa sebagai salah satu desa budaya. Ada budaya sadeka Ponan, para perajin tenun, dan sanggar seni dengan berbagai atraksi budaya yang dimilikinya. Ternyata tidak hanya kaya dengan budaya dan adat istiadat, Desa Poto memiliki potensi kekayaan lain, yaitu kekayaan alam berupa Olat Manir. Sebuah hutan desa dengan luas sekitar ± 10 hektar. Di mana pada masa ini di bawah kepemimpinan kepala desa Fathul Muin. Masyarakat Desa Poto melihat Olat Manir sebagai satu potensi yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi suatu bangsa ditentukan oleh berbagai hal antara lain : jumlah penduduk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya alam, moral, dan mental bangsaitu sendiri (Surasmi & Agusprastya, 2017). Hutan Desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Suwarti, M Saleh Soeaidy, 2015). Berangkat dari latar belakang di atas, isu perubahan iklim yang terus terjadi saat ini ingin dijawab oleh masyarakat Desa Poto melalui program konservasi hutan desa.

METODE

Penelitian ini masuk ke jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi dan dokumentasi. *Ela bate tarang tajo* digunakan sebagai pendekatan untuk menggerakkan banyak pihak. Semangat keikhlasan hadir begitu kuat untuk melaksanakan kegiatan konservasi hutan desa di Olat Manir Dusun Sameri Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Kolaborasi antara penggerak, pemerintah desa, LSM, gerakan pramuka, anggota DPR RI, karang taruna, remaja masjid, pokdariwis, dan seluruh lapisan masyarakat dusun Sameri Desa Poto. Dilakukan secara sporadik dengan tetap mengedepankan koordinasi melalui *Whatsapp Group*.

Menyiapkan tempat penataan bibit pohon, mendistribusikan bibit pohon dari berbagai tempat kemudian dikumpulkan di lokasi penataan bibit. Sampai pada kegiatan penanaman bibit pohon dilakukan dengan semangat keikhlasan, kesukarelaan, dan gotong royong. Inilah semangat *ela bate tarang tajo* yang telah melembaga di dalam tiap individu masyarakat Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Poto terletak di bagian Barat kecamatan Sumbawa, pada ketinggian 225 mdpl. Desa ini memiliki luas 1.367,00 Ha/m² dengan kontur wilayah dataran rendah dengan total kemiringan tanah 15 – 40 Derajat. Penggunaan lahan secara umum terdiri dari pemukiman seluas 40,00 Ha/m², persawahan 670,00 Ha/m² (menggunakan irigasi ½ teknis 100,00 Ha/m² dan tadah hujan 20,00 Ha/m²), perkebunan 448,00 Ha/m², kuburan 50,40 Ha/m², perkantoran 12,00 Ha/m², prasarana umum 128,60 Ha/m², pekarangan 28,00 Ha/m², ladang atau tegalan 470 Ha/m². Secara administratif Desa Poto berbatasan dengan Desa Sebewe di sebelah utara, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Berare, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Moyo dan di sebelah barat dengan Kelurahan Seketeng.

Desa Poto memiliki penduduk sebanyak 2652 jiwa yang terdiri dari 1.219 jiwa penduduk laki-laki dan 1.343 jiwa penduduk perempuan. Jumlah anak yang berusia 0-18 tahun tercatat 697 jiwa, yang terdiri dari 357 laki-laki dan 340 perempuan. Sementara anak usia sekolah 7-18 tahun berjumlah 473 jiwa, tercatat 235 laki-laki dan 238 perempuan. Mayoritas masyarakat sebagai petani, sebanyak 1.223 orang dan peternakan sebanyak 265 orang. Terdapat masyarakat berprofesi sebagai buruh migrant 15 orang, pegawai negeri sipil 66 orang, pedagang keliling 26 orang, montir 1 orang, bidan swasta 9 orang, POLRI 1 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI 19 orang, dukun kampung terlatih 4 orang, dosen swasta 3 orang, dan karyawan perusahaan swasta 19 orang.

Penduduk Desa Poto Mayoritas tamatan SD dengan total jumlah 466 jiwa, menamatkan SMP sebanyak 220 jiwa, menamatkan SMA sejumlah 284 jiwa, tamatan Diploma sebanyak 46 jiwa dan tamatan Sarjana maupun Magister sebanyak 105 jiwa. Selain pendidikan formal, desa Poto juga didukung oleh pendidikan non-formal, seperti Sanggar Seni Permata, Sanggar Seni Cinde Bulaeng dan Sanggar Seni Matano.

Terdapat tenaga bersalin terlatih, bidan, dan perawat. Jumlah tenaga kesehatan di Desa Poto Tahun 2021 sebanyak 7 orang. Prasarana pelayanan kesehatan di Desa Poto terdiri dari puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan, posyandu, dan rumah bersalin. Status gizi buruk pada balita di Desa Poto dapat dikatakan dalam zona aman dikarenakan jumlah balita bergizi baik yaitu 189 balita dari 200 balita. Sedangkan 11 balita lainnya dikategorikan sebagai balita bergizi kurang. Jumlah masyarakat cacat mental dan fisik yang tercatat di Desa Poto yaitu 20 orang dengan cacat fisik dan 6 orang cacat mental (Fahrunnisa, Ayuning Atmasari, Apriadi, 2021).

Konservasi hutan Desa Poto telah mampu menggerakkan berbagai kalangan. Semangat gotong royong, kerjasama, sukarela, dan keihlasan yang dijadikan sebagai pemantiknya. Dalam falsafah masyarakat Sumbawa dikenal dengan istilah *Ela Bate tarang Tajo*. Umumnya semboyan ini digunakan sebagai yel-yel atau aba-aba oleh masyarakat Sumbawa ketika membangun rumah panggung. Konstruksi rumah panggung Sumbawa yang berbahan baku kayu. Ketika akan membangunnya, membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Diperlukan gerakan yang kompak dan seirama di dalam pelaksanaan pembangunannya. Maka untuk menjaga irama dan kekompakan tadi, salah seorang memimpin aba-aba...”*ela bate tarang tajo*”...bergeraklah seluruh masyarakat yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam kegiatan pembangunan rumah panggung Sumbawa. Semangat inilah yang kemudian diusung dalam kegiatan konservasi hutan Desa Poto. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan (Irawati et al., 2019).

Adapun jenis bibit tanaman yang berhasil dikumpulkan antara lain kayu beringin, kayu mahoni, kayu jati, kayu nangka, kayu sukun dan kayu jabon. Di antara jenis bibit yang tersedia secara varietas didominasi oleh beringin dan sukun. Dari jumlah bibit yang terkumpul masih belum mampu mengisi seluruh luas kawasan yang Olat Manir. Sehingga masih diharapkan kegiatan konservasi berlanjut secara terus menerus.

KESIMPULAN

Terdapat 3 hal penting yang dapat kami jadikan sebagai kesimpulan dalam konservasi hutan Desa Poto :

1. Sinergi, semua berbaur dengan menanggalkan status social masing-masing. Bekerja bersama untuk menghijaukan Olat Manir Desa Poto.
2. Efisiensi, anggaran diegelontorkan secara sukarela oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat. Tidak harus selalu menunggu anggaran yang turun dari pemerintah. Untuk kebaikan bersama dana pribadi pun baiknya secara segera kita sumbangkan.
3. Konservasi bagi bumi, pelestarian lingkungan menjadi salah satu solusi guna menjawab permasalahan yang telah kami sampaikan pada bagian awal tulisan ini. Andai saja di tiap satu desa menyiapkan area yang siap untuk dikonservasi. Minimalisir atas dampak perubahan iklim dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa.

REFERENSI

- Asnawi, R. (2015). *CLIMATE CHANGE AND FOOD SOVEREIGNTY IN INDONESIA* . 293–309.
- Elvin Adrian, Mimin Karmini, B. (2009). *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Global*.
- Fahrunnisa, Ayuning Atmasari, Apriadi, L. A. T. (2021). *PERCEPATAN IMPLEMENTASI SDGs DESA MELALUI DESA LAYAK ANAK*.
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 2(1), 87–104. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>
- Irawati, Jusuf, Y., & Dassir, M. (2019). Model Pembangunan Hutan Desa Di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 1(1), 16–23.
- Maria Theresia Sri Budiastuti. (2020). Agroforestri Sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim. *Seminar Nasional Magister Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, 2020*, 23–29. <http://dx.doi.org/10.11594/nstp.2020.0603>
- Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Surasmi, W. A., & Agusprastya. (2017). Gerakan Sosial Penghijauan Di Lereng Barat Gunung Wilis Oleh Masyarakat di Kabupaten Madiun. *CIVIC-CULTURE: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 9924(2), 47–54.
- Suriadi, A. (2020). *Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian Di PROVINSI NTB*. 384–391.
- Suwarti, M Saleh Soeaidy, S. (2015). *IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA DI KABUPATEN*

GUNUNGKIDUL. *REFORMASI* ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864
(Online) Vol. 5, No. 1, 2015, 9, 195–203.
Undang- Undang no 41 tentang Kehutanan